

TERBENTUK KOMITE PENGHAPUSAN BENSIN BERTIMBAL (KPBB)

Setelah melakukan evaluasi terhadap penghapusan bensin bertimbel pada tahun 1999 LSM-LSM Indonesia melakukan koalisi untuk mengadvokasi terhadap penghapusan bensin bertimbel dengan membentuk komite penghapusan bensin bertimbel. Komite Penghapusan Bensin Bertimbal atau *Joint Committee for Leaded Gasoline Phase-out* (KPBB) adalah sebuah jaringan kerja advokasi nirlaba yang berupaya menghapuskan bensin bertimbal di Indonesia. Jaringan kerja ini diprakarsai oleh tiga LSM yaitu Walhi Jakarta, Lembaga Konsumen Hijau Indonesia (Lemkohi), dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). KPBB dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1999.

Tujuan utama dari KPBB ini adalah: *pertama*, membentuk wadah bagi partisipasi masyarakat dalam upaya penghapusan bensin bertimbal; *kedua*, memfasilitasi interaksi stakeholder dalam upaya mereformulasikan rencana penghapusan bensin bertimbal; *ketiga*, mengusulkan kepada pemerintah target waktu yang realistis dan terstruktur dalam rencana penghapusan bensin bertimbal tersebut.

Untuk mencapai tujuan di atas, KPBB akan melakukan serangkaian kegiatan advokasi yang terpadu melalui kegiatan diskusi, lokakarya, seminar, publikasi, *public hearing*, *lobby*, penelitian, survei, dan kampanye. Dalam menjalankan aktivitasnya KPBB akan memegang prinsip-prinsip tanpa kekerasan, kesetaraan, keterbukaan, bekerja sama, saling belajar, efektif, partisipatif, dan independen.

Usaha ini dilakukan untuk kembali mengingatkan pada masyarakat akan bahaya yang di timbulkan oleh bensin bertimbal tersebut dengan melakukan serangkaian program yang melibatkan stakeholder yang lebih luas untuk membahas bersama-sama permasalahan penghapusan timbel di Indonesia. Jadwal yang dibuat stakeholder ini dapat diterjemahkan oleh Pemerintah menjadi program setiap departemen terkait sehingga penghapusan timbel dapat dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan program, KPBB melakukan program yang terencana yaitu :

1. Melakukan desk study
2. Pertemuan LSM (NGO forum)
3. Pertemuan Stakeholder
4. Diskusi dan *Public Hearing*
5. Membuka Web Site on line
6. Diseminasi informasi dan kampanye

1. Desk study

Data yang terkumpul dari analisis KPBB terhadap penghilangan timbel ada beberapa hal yang dapat menjadi bahan diskusi:

- a. Koordinasi antar instansi belum ada kesepakatan dalam jadwal penghilangan timbel
- b. Biaya memodifikasi kilang (*refinery*) tidak tersedia
- c. Bensin tanpa timah hitam mahal harganya dan akan membebani konsumen.
- d. Sebagian besar mobil tidak dapat digunakan lagi bila bensin bertimbal hitam tidak lagi beredar

a. Koordinasi antar Instansi belum ada kesepakatan dalam jadwal penghilangan timbel

Perhatian dan pemusatan yang terlampau ekstrim pada pertumbuhan ekonomi, telah mengakibatkan diabaikannya kepentingan lingkungan dan sosial. Pemerintah pada masa lalu selalu beralih bahwa tidak digunakannya timbel sebagai bahan untuk meningkatkan kadar

oktan akan menimbulkan biaya tinggi. Hal ini terjadi karena kalkulasi biaya yang dilakukan hanya dilihat dari satu sisi yaitu produsen (dalam hal ini Pertamina) dengan mengabaikan kepentingan lingkungan dan masyarakat. Kenyataan ini menjadikan persoalan tersendiri dari pemerintah orde baru dan Kabinet Persatuan Nasional. Ketidak-kompakan antar menteri terhadap lingkungan sering secara terbuka diungkapkan seperti kasus penutupan PT Indo Rayon di Sumatera Utara yang mencemari lingkungan oleh Menteri Lingkungan ditentang oleh menteri Deperindag dan menteri PM dan PBMN. Dalam kasus penghilangan timbel dengan jelas Menteri Lingkungan sepakat dengan jadwal yang diinstruksikan Presiden tetapi Menteri Pertambangan dan Energi, dan Pertamina tetap dengan jadwal penghilangan timbel pada tahun 2003. Di pihak Kepolisian sampai saat ini tidak bisa melaksanakan uu no 14 tahun 1992 karena aturan pelaksana tentang pemeriksaan emisi gas buang kendaraan di jalan sampai saat ini (sudah 8 tahun) belum ada. Koordinasi antara Departemen Perhubungan, Kejaksaan dan Pihak kepolisian belum ada perkembangan sampai sekarang.

b. Biaya modifikasi refinery tidak tersedia

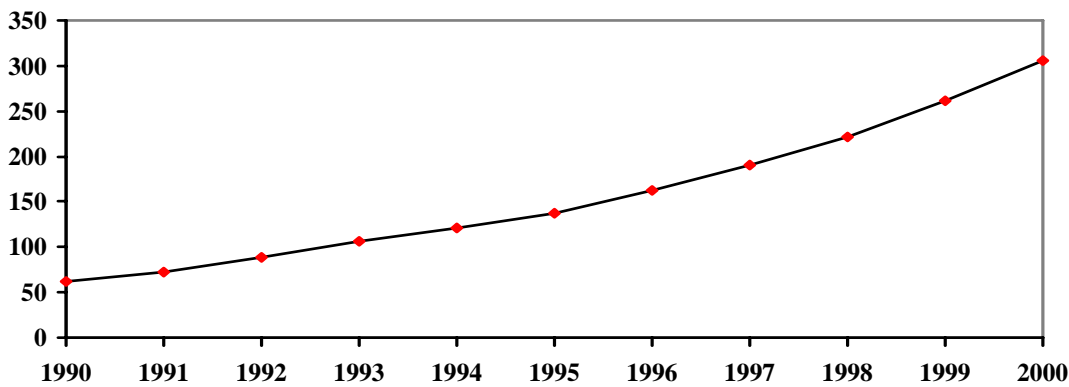
Berbagai penyakit diderita masyarakat akibat kandungan timbel di udara yang jauh diambang batas, termasuk menurunnya tingkat kecerdasan anak-anak diakibatkan oleh ketidakmampuan pemerintah untuk menginternalisasi faktor lingkungan dan sosial kedalam kebijaksanaan minyak dan gas. Study yang dilakukan oleh Universitas Indonesia tahun 1991 mengestimasi dampak dari adanya timbel pada bensin di Jakarta sebanyak 62.000 kasus penyakit tekanan darah tinggi, 350 kasus penyakit jantung, 340 kematian dan 300 ribu points penurunan IQ pada anak-anak. Dampak dari menurunnya kesehatan masyarakat oleh bensin mengandung timah hitam ialah biaya kesehatan yang sangat besar yang harus ditanggung oleh masyarakat. Menurut studi Bank Dunia, pada tahun 1990 saja, biaya itu mencapai US\$ 62.400.000 (lihat tabel 5). Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan bila bensin masih tetap menggunakan timah hitam, maka dalam waktu 5 tahun biaya kerusakan akan meningkat dengan cepat.

Tabel 5. Biaya Kesehatan

No	Jenis Dampak Kesehatan	Besarnya Dampak	Nilai Kerusakan US\$ /Tahun
1	Peningkatan jumlah kematian orang dewasa oleh penyakit Cardiovasculer karena tingginya konsentrasi timah hitam di udara	340 orang / tahun	25,5 juta
2	Kasus-kasus hipertensi (tekanan diastolic > 90 mmHg)	84.000 orang / tahun	0.5 juta
3	Kasus-kasus penyakit jantung koroner pada orang dewasa	350 orang / tahun	0.4 juta
4	Kehilangan IQ pada anak-anak	300.000 point / tahun	36.1 juta
Jumlah			62.45 juta

Tabel 6. Nilai Kesehatan Tahun 1995 – 2000

No	Keterangan	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1	Nilai kerusakan kesehatan karena penggunaan bensin dengan timah hitam dalam juta US\$	138	162	190	222	261	306



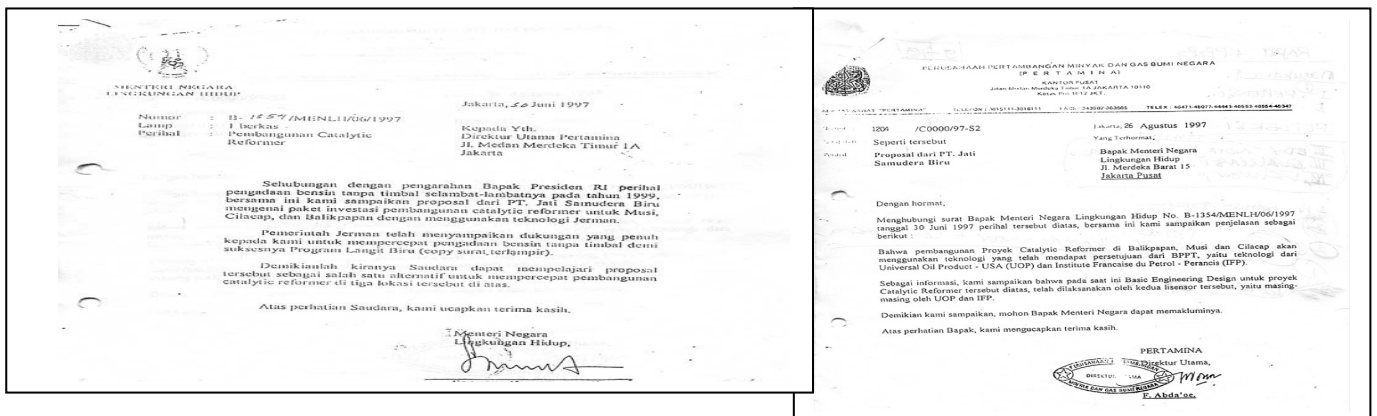
(Sumber: Dari World Bank, dimodifikasi Bappedal)

Dari angka nilai kesehatan yang disebabkan oleh timbel pada tahun 2000 di perkirakan US\$ 306 juta. Padahal untuk membangun *catalytic reformer* untuk sebuah kilang di Cilacap hanya US\$ 30 juta.

Data Pertamina direktorat Pengolahan dalam rencana proyek pengembangan kilang untuk penghapusan timbel akan membangun unit *catalytic reformer* yang akan menghasilkan *high octane mogas component* (HOMC) Sebagai berikut :

- Musi dengan kapasitas 13,5 ribu barel/hari, investasi sebesar US\$ 91,5 juta
- Balikpapan dengan kapasitas 18 ribu barel/hari, investasi sebesar US\$ 103,7 juta
- Cilacap (revamping) dengan kapasitas 5 ribu barel/hari, investasi sebesar US\$ 30,0 juta

Usaha ini telah disampaikan sejak bulan September tahun 1995 dan diperkirakan dapat selesai selama 30 bulan. Proses ini tidak terjadi karena ada KKN di Pertamina terlihat jelas dari adanya surat Menteri Lingkungan yang ditolak oleh Direktur Pertamina dalam hal usulan pembangunan kilang dengan pinjaman dari negara Jerman dengan bunga 3-4% pertahun (lihat surat dibawah ini).



Disisi lain, salah satu point dalam perjanjian yang harus dikembangkan sebagai upaya menerapkan Paket IMF adalah konversi energi bersih termasuk bensin tanpa timbal, meskipun IMF dalam hal ini telah memberikan ultimatum hingga batas waktu Desember 1999 ,hal ini tidak terpenuhi. Dalam Lol Indonesia dengan IMF yang direvisi dalam poin 93 terdapat juga penghilangan timbel. Hal ini jelas ada tanggung jawab dan konsekuensi dari IMF untuk mengeluarkan paker pinjaman dalam penghapusan bensin bertimbel.

Semua persolaan investasi untuk pembangunan unit *reformer catalitic* sudah terjawab tidak ada masalah. kebijakan pemerintah yang sungguh-sungguh untuk menghilangkan timbal yang belum ada.

c. Bensin tanpa timah hitam mahal harganya dan akan memberatkan konsumen.

Kebijaksanaan bahan bakar (*pricing policy*) yang diterapkan khususnya bahan bakar tanpa timbel sama sekali tidak menarik konsumen. Pemerintah dengan dengan sengaja menganak-tirikan diversifikasi energi sehingga perkembangan alternatif selain BBM menjadi sangat lamban. Pola subsidi yang diterapkan selama ini sangat tidak berpihak pada masyarakat.

Bahwa dengan disubsidinya harga BBM dimana orang asing dan orang kaya yang mempunyai mobil menikmati subsidi yang diberikan oleh masyarakat yang membayar pajak. Sedangkan bensin tanpa timbel (Super TT) dengan sengaja dinaikkan oktannya dibandingkan premium sehingga harga jualnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bahan bakar tanpa timbel. Tidak diikutsertakannya masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta tidak transparannya keputusan ditetapkan menimbulkan biaya sosial yang sangat tinggi. Posisi mutlak yang diberikan kepada Pertamina ternyata tidak hanya menimbulkan berbagai penyimpangan internal (KKN) tetapi juga telah menimbulkan biaya sosial yang sangat tinggi.

d. Sebagian besar mobil tidak dapat digunakan lagi bila bensin bertimah hitam tidak lagi beredar

Pengaruh bensin bertimbel bagi kendaraan yang selama ini dianggap dapat merusak mesin kendaraan sudah merupakan cerita yang tidak masuk akal terutama bagi kendaraan-kendaraan keluaran tahun 1985 keatas. Kendaraan yang dirancang pada tahun 80-an sudah menggunakan dudukan katup yang keras sehingga tidak berpengaruh terhadap mesin saat pembakaran, sebagai pelumas dapat diganti dengan yang lain selain timbel yang nyata-nyata merusak kesehatan lingkungan lebih-lebih terhadap anak-anak, bahkan penggunaan bensin tanpa timbel dapat mengurangi korosi.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dan Perusahaan Pos Amerika, juga Pemerintah Jerman tidak bisa membuktikan bensin tanpa timbel dapat merusak mesin mobil, kecuali pada mesin yang mempunyai dudukan katup yang tidak keras.

Berdasarkan penelitian bensin tanpa timbel memang mempunyai pengaruh pada mesin-mesin kendaraan tua yang tahun produksinya dibawa tahun 80-an dapat merusak dudukan katup, itupun kalau mobil dipacu pada kecepatan 100 km/jam selama satu jam. Kalau kendaraan dijalankan dalam keadaan normal apalagi di Jakarta sulit kecepatan 100 km/jam selama satu jam penuh, jadi tidak ada persoalan menggunakan bensin tanpa timbel. Menurut data dari Gaikindo kendaraan jenis yang berpengaruh resiko rusak tersebut tinggal 3 % jumlahnya. Bagi kendaraan tua untuk menanggulangi akibat rusaknya katup pada mesin dapat diatasi dengan zat aditif khusus untuk bensin (MTBE ; *methyl-tertiary-butyl-ether*)

Berdasarkan merk dan tahun, kendaraan-kendaraan yang tidak memerlukan timah hitam atau timbel

- Sejak tahun 1978 ; Mitsubishi, Nissan, Suzuki
- Sejak tahun 1979 ; Subaru, Daihatsu (kecuali Taft 4x4 1983)
- Sejak tahun 1981 ; Honda dan Toyota
- Sejak tahun 1982 ; Isuzu dan Mazda.

Anggapan kedua yang sering membuat pemilik kendaraan memilih bensin bertimbel karena mesin menjadi lemah kinerjanya, padahal yang menyebabkan tarikan mesin lemah atau tidak itu disebabkan pengaruh oktan dari bahan bakar, dimana semakin tinggi nilai oktannya semakin baik untuk tarikan daya mesin. Untuk Indonesia saat ini super TT mempunyai nilai oktan (98) yang lebih baik dari premix (95) ataupun premium (88) sedangkan bensin biru nilai oktan (80).

Secara teknis bensin bertimbel juga dapat merusak *catalytic converter* pada mobil-mobil baru. Timbel yang ada pada bensin itu keluar dalam bentuk debu akan menyumbat saringan udara yang ada pada *catalytic converter*. *Catalytic converter* pada mobil-mobil baru sangat berperan mengurangi emisi sampai lebih dari 80 % (Edy Purwanto, BAPEDAL)

2. Rekomendasi Lokakarya Stakeholder

Penyelenggaraan lokakarya ini dilatarbelakangi karena penghapusan bensin bertimbel memerlukan langkah-langkah dan kesiapan dari semua stakeholder terkait serta perlunya penyamaan persepsi terhadap langkah-langkah yang harus diambil, juga didasarkan pula pada hasil rekomendasi NGO Forum "Bensin Bertimbel Harus Segera Dihapuskan, Untuk Generasi Nanti".

Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) melaksanakan kegiatan lokakarya selama dua hari pada tanggal 28-29 Februari 2000. Tema yang diambil pada lokakarya ini "PENGHAPUSAN BENSIN BERTIMBEL SEBAGAI KEBIJAKAN ENERGI BERSIH DI INDONESIA". Hari pertama membahas tentang strategi penghapusan bensin bertimbel, sedangkan hari kedua membuat action plan dari penghapusan bensin bertimbel. Maksud dan tujuan dilaksanakan lokakarya adalah dihasilkannya suatu rencana aksi penghapusan bensin bertimbel yang mengakomodasikan kepentingan stakeholder dan dicapainya kesepakatan bahwa Jakarta dan sekitarnya sebagai pilot project menuju bebas timbel tahun 2003.

Kesimpulan dan rekomendasi dari lokakarya yang dihadiri dan diwakili para stakeholder menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1585 K/32/MPE/1999 yang menyebutkan bahwa mulai 1 Januari 2003 bensin di Indonesia tidak lagi mengandung timbal merupakan suatu komitmen pemerintah yang mengikat
2. Untuk menuju Indonesia bebas timbal mulai tahun 2003, strategi penghapusan bensin bertimbel perlu ditetapkan berdasarkan pertimbangan efektifitas biaya.
3. Deregulasi di sektor hilir migas , dengan tujuan untuk menciptakan mekanisme pasar penjualan bahan bakar domestik merupakan pilihan strategis jangka menengah dan jangka panjang yang paling efektif. Untuk itu perlu segera mengajukan kembali RUU Migas kepada DPR dan DPR perlu mendesak Pemerintah agar mengajukan kembali RUU migas tersebut.
4. Untuk mencapai target waktu penghapusan bensin bertimbel, pengadaan bensin tanpa timbal akan dilakukan oleh Pemerintah dengan cara realisasi pembangunan unit *catalytic reformer* dan isomerisasi yang akan dimulai pada awal tahun 2001 dan akan selesai pada akhir tahun 2001.
5. Sebagai target antara, mulai tahun 2001 bensin bertimbel akan dihapus di wilayah Jakarta dengan cara penambahan impor HOMC. Pemerintah melalui Departemen Keuangan perlu mengalokasikan dana untuk penambahan impor tersebut dalam RAPBN tahun 2001.
6. Sosialisasi mengenai dampak negatif bensin bertimbel dan keuntungan bensin tanpa timbal kepada masyarakat perlu dilakukan untuk mendorong penghapusan bensin bertimbel secara cepat.
7. Perlu dikaji kebijakan subsidi dan harga bahan bakar agar tepat sasaran dan terarah, baik yang menyangkut subsidi untuk meringankan beban rakyat ekonomi lemah maupun disinsentif/insentif harga bahan bakar untuk mendukung konservasi energi dan pengendalian pencemaran lingkungan.

8. Spesifikasi dan standar mutu bahan bakar nasional perlu ditetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan dan konservasi energi serta mengacu pada standar internasional yang berlaku.
9. Masyarakat terus menerus perlu memantau pelaksanaan rencana penghapusan bensin bertimbel.
10. Jika pada tanggal yang ditetapkan yaitu 1 Januari 2003 tidak dapat dicapai penghapusan bensin bertimbel, masyarakat dapat melakukan upaya hukum atas kelalaian pemerintah untuk melindungi rakyat dari ancaman kesehatan.

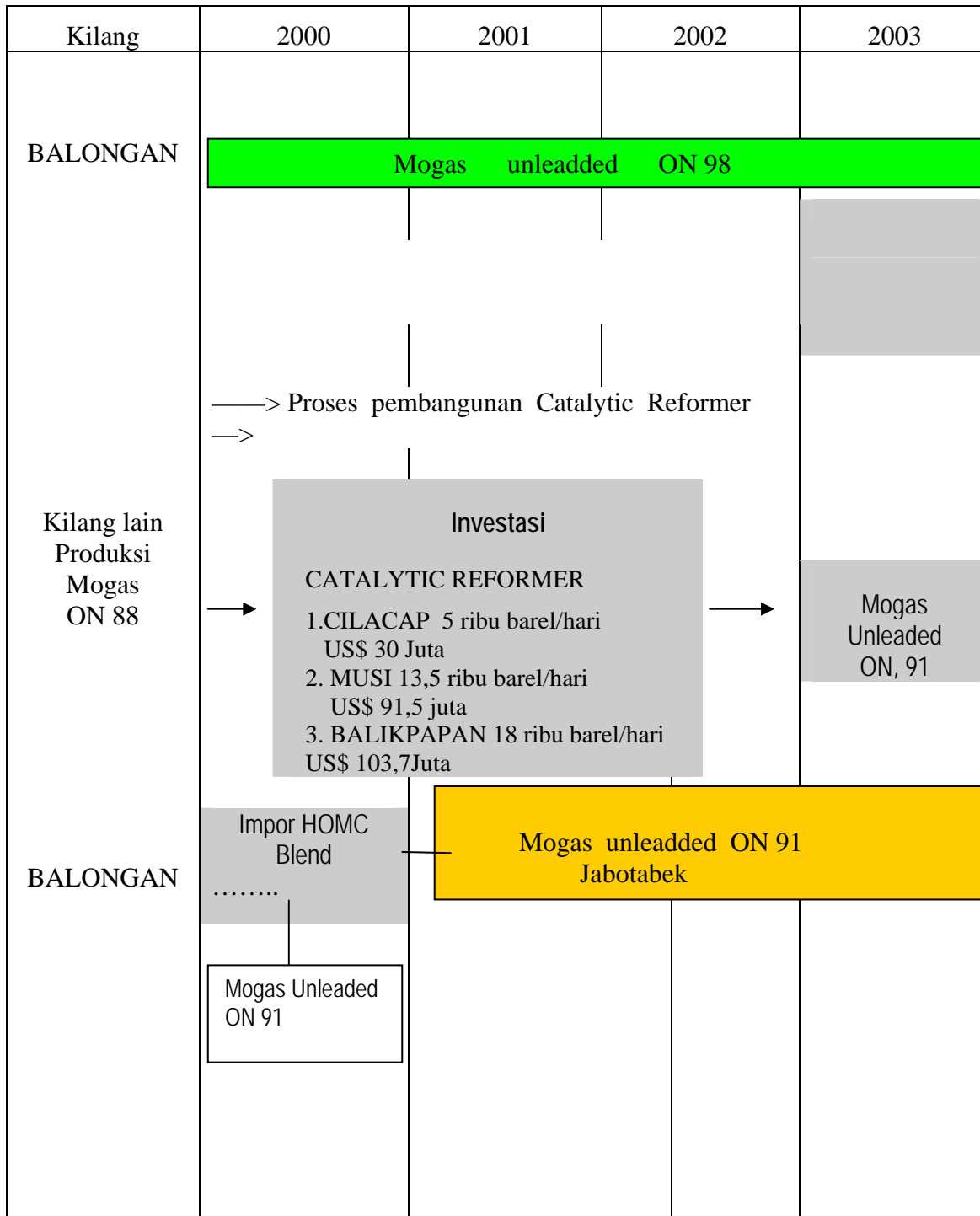
Strategi Dilakukan oleh KPBB

Rekomendasi stekholder adalah hasil awal yang dicapai oleh KPBB. Persoalan timbel tidak hanya sampai adanya atau tersusunnya jadwal yang pasti dari Pemerintah, tetapi perlunya langkah-langka yang lebih kongkret oleh Pemerintah berupa program yang dapat dipantau oleh masyarakat luas dan dikomunikasikan dengan wakil-wakil rakyat yang ada di DPR. KPBB akan terus berupaya mengempayekan pada masyarakat dan mengajak semua stakeholder untuk membicarakan persoalan ini sampai adanya **Kepres** yang mengatur penghapusan timbel dalam BBM. Sementara Pemerintah merumuskan langkah-langka yang akan dilakukan, KPBB bersama LSM-LSM akan membuat dan menyusun **gugatan** "class action" yang akan di ajukan pada Pemerintah apabila Pemerintah **menunda** lagi penghapusan timbel. **Walaupun demikian, para pengelola bahan bakar bensin telah gagal merealisasikan intruksi penghapusan timbal tahun 1999 tanpa harus memikul tanggung jawab apapun.** Penundaan bukan saja berarti makin tingginya dan banyaknya jumlah korban. Penundaan juga dapat berarti tersedianya kesempatan penundaan lagi di kemudian hari. Oleh karena itu, strategi dan langkah-langkah yang akan dilakukan adalah :

- Pemasyarakat secara luas tentang bahaya bensin bertimah hitam agar masyarakat luas memahami resiko yang dihadapi dan terus mendesak pemerintah agar mempunyai program kampanye penyadaran pada masyarakat, mengapa segera mungkin menghilangkan timah hitam dari bahan bakar bensin ?. Di samping itu, langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah, KPBB melakukan menjaring korban dan keluhan masyarakat dengan cara membuka pengaduan on-line tentang korban kesehatan yang diakibatkan oleh pengaruh timbel dan kemudian melakukan kampanye publik penyadaran masyarakat dan melakukan penekanan pada Pemerintah agar kebijaksanaan ini tidak perlu ditunda lagi.
- Memberikan tekanan kepada Pemerintah agar memenuhi komitmen secara penuh pada waktu yang telah ditetapkan melalui :
 1. Minta kepada Pemerintah untuk menjelaskan tentang pengunduran selama tiga tahun ini (1999-2003) dengan melalui keputusan Presiden untuk menetapkan jadwal pengunduran tersebut.
 2. Menuntut kepada Pemerintah agar segera menjelaskan kepada masyarakat tentang rencana kerja pemenuhan komitmen ini secara detail beserta jadwal waktu masing-masing langkah agar dapat di monitor setiap waktu.
 3. Pemerintah perlu mengumumkan setiap langkah serta hasilnya dalam program penghapusan timah hitam dari bahan bakar bensin. KPBB bersama masyarakat memantau langkah-langkah tersebut.

- Pemerintah perlu segera memberikan komitmen pengadaan bahan bakar bensin tanpa tmbel awal tahun 2001 dengan additive yang untuk sementara waktu perlu diimpor, karena bila bensin premium naik 12%, biaya impor sudah dapat tercover sebab harga pokok premium menurut data Pertamina Rp.1030. Apabila pemerintah tidak mampu, maka pemerintah perlu mendorong sektor swasta untuk melaku

SKENARIO KPBB UNTUK MENUJU BENSIN TANPA TIMBAL 2003



DAFTAR PUSTAKA

Reksosoekarto S, *Pengembangan Bensin Tanpa Timbal untuk Memenuhi Kebutuhan Industri Otomotif di Era Pasar Bebas*, Nov 1998, Pertamina. (makalah)

_____, *Existing Conditin & Future Planning for Fuel Quality Policy in Indonesia*, Febuari 1999 Pertamina, (dalam bentuk makalah)

_____, *Rencana Penyediaan Mogas on 88 Unleaded di Indonesia, 2000* (makalah)

Thomas Walton, *World-Wide Experience with Conversion to Unleaded Gasoline*, November 1998, The World Bank, (Makalah)

Brodjopangarso S, *Produksi Bensin Tanpa Timbal di Kilang-Kilang Minyak Pertamina*, 1998, Pertamina.

Purwanto E, *Pencemaran udara Yang Diakibatkan oleh Timah Hitam Dari Kendaraan Bermotor*, 1998, BAPEDAL. Makalah.

U.S.EPA 1998 . Implementer's Guide To Phasing out lead In Gasoline

Swisscontact 1999, final report dokument, part 1, program SEGAR Jakarta,